



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13608-13627

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pembangunan Infrastruktur Hinterland di Kota Batam dalam Perspektif Ketahanan Nasional

Ari Binsar Sihombing^{1✉}, Margaretha Hanita²

Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia

Email: aribin02121986@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Bagian wilayah *hiterland* Kota Batam khususnya Galang, Bulang dan Belakang Padang pembangunan yang terjadi masih belum merata, maka pemerintah Kota Batam berupaya melakukan pengembangan wilayah. Pengertian daerah/wilayah disini mencakup daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi, masing-masing sebagai daerah otonom. Metode penelitian dalam artikel ini adalah metodologi kualitatif melalui penelitian pustaka dengan mendalami bahan-bahan pustaka yang relevan, data statistik dari Pemko Batam dan Kelurahan-kelurahan terkait, dan wawancara dari instansi terkait kemudian menarasikannya.

Kata kunci: *Pembangunan Infrastruktur, Pulau Hinterland, Ketahanan Nasional*

Abstract

Infrastructure development is part of national development. National development is an effort carried out as a step to develop Indonesian people. This implies that every policy that will be taken related to development must be aimed at development that is evenly distributed throughout Indonesia and implemented for the benefit of the community so that the results of this development can truly be felt by the community so that in the end it can have an impact on improving and increasing the standard of living of the Indonesian people. Parts of the hinterland area of Batam City, especially Galang, Bulang and Rear Padang, the development that has occurred is still uneven, so the Batam City government is trying to carry out regional development. The definition of area/territory here includes regency/municipal areas and provincial regions, each of which is an autonomous region. The research method in this article is a qualitative methodology through literature research by studying relevant literature, statistical data from Pemko Batam and related sub-districts, and interviews from related agencies and then narrating it.

Keywords: Infrastructure Development, Hinterland Island, National Resilience

PENDAHULUAN

Masalah dalam hal infrastruktur yang dihadapi adalah masih kurangnya sarana atau fasilitas dasar yang ada di Kota Batam dan masih belum selesainya pusat pemerintahan Kota Batam. Hanye dkk (2014) Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Kota Batam secara implementatif berhasil dan membawa perubahan terhadap kondisi infrastruktur di daerah tersebut. Selain itu tersedianya infrastruktur juga menurut Sutarto dan Solihin (2019) menjadi kendala dalam melakukan pembersihan sampah di Kecamatan Belakang Padang. Permasalahan infrastruktur ini perlu di tanggulangi untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara wilayah Kabupaten/Kota dalam hal ketersediaan infrastruktur darat berupa jalan dan jembatan, infrastruktur laut berupa pelabuhan, dermaga dan kapalangkutan.

Penyediaan Infrastruktur tersebut secara bertahap diharapkan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang ada di masing-masing pulau dan tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Batam. Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting dalam menggeliatkan investasi di Kota Batam. Di bawah kepemimpinan Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Muhammad Rudi, pembangunan infrastruktur menuju Batam Kota Baru yang lebih maju terus digesa hingga 2024 mendatang.

Batam terdiri dari pulau-pulau dengan ukuran atau luasan yang berbeda-beda dengan pulau pusat pertumbuhan yang berada di Pulau Batam. Kota Batam memiliki satu pulau besar, yaitu Pulau Batam dan 329 pulau berpenghuni yang berada di wilayah Kota

bahwa terdapat masalah yaitu wilayah Hiterland masih belum merata untuk pembangunan infrastruktur, yaitu di Belakang Padang masalah penerangan atau listrik masih menjadi masalah besar, karena listrik hanya akan di nyalakan 9 Jam saja dalam sehari, sehingga masyarakat setempat masih menggunakan genset untuk mendapatkan penerangan, di Kecamatan Bulang dan Galang juga masih ada masalah terdapat masalah listrik, hal ini juga terjadi karena pulau-pulau kecil yang berada di tengah laut tidak mendapatkan pasokan listrik yang mencukupi, namun sebagian kelurahan sudah mendapatkan penerangan yang baik sejak di bangunnya Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) di bangun pada tahun 2020 karena Covid 19. Air bersih sudah dapat di nikmati masyarakat setempat, yang dulunya susah mendapatkan air bersih, dan jalan utama juga sudah baik.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengembangan wilayah pada daerah Batam, yaitu pada karena saat ini wilayah *hiterland* sedang menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam untuk dikembangkan. Adapun pengkhususan pelayanan koridor Jalan publik yang diambil adalah jenis pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2009-2029. Hal yang sudah diketahui bahwa pembangunan di Kota Batam sudah *over development*, sehingga sudah seharusnya arah pembangunan bergeser ke wilayah lain, penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk mengurangi kesenjangan antar daerah diperlukan peningkatan efektivitas program-program pengembangan daerah yang didasarkan atas kesesuaian topologi dengan karakteristik wilayah yang akan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian memfokuskan pengembangan wilayah *hinterland* tepatnya pada wilayah sepanjang daerah *hinterland*, guna mewujudkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, menyeimbangkan pembangunan wilayah Kota Batam, dan menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat komprehensif dan holistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui penelitian pustaka dengan mendalami bahan-bahan pustaka yang relevan, data statistik dari Pemko Batam dan Kelurahan-kelurahan terkait, dan wawancara dari instansi terkait kemudian menarasikannya. Penelitian dimulai dengan mendalami terminologi yang digunakan dalam objek penelitian. Strauss & Corbin (2007) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non-matematis yang menghasilkan temuan melalui data-data yang dikumpulkan dengan berbagai media antara lain dokumen atau arsip (pustaka).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pulau-Pulau Hinterland di Kota Batam Ditinjau Dari Perspektif Ketahanan Nasional

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan berarti alat atau instrument guna mengatur penduduk dari atas ke bawah dengan memberi penghargaan (*rewards*) dan sanctions kebijakan pula dapat diartikan sebagai blueprint dimana akan mempengaruhi perilaku banyak orang yang akan terkena dampak suatu keputusan yang dibuat. (Amri Marzali, 2012).

Kebijakan publik merupakan studitentang keputusan dan tindakanpemerintah yang disusun untuk kepentingan publik. (Surya Fermana, 2009). Pembentukan suatu kebijakan tidak terlepas dari aktor-aktor yang turut mengambil keputusan dalam perumusannya. Menurut James Anderson, aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan terbagi dua, yaitu para pemeran serta resmi dan pemeran serta tidak resmi. (Budi Winarno, 2014).

Pemeran serta resmi yakni: (1) Badan Badan Administrasi, biasanya menjadi sumber utama mengenai usul pembuatan undangundang dalam sistem politik, tidak hanya menyarankan, badan-badan administrasi juga melakukan lobi dan menggunakan tekanan-tekanandalam menetapkan undang-undang. (2) Presiden, memegang peran penting dalam melakukan perumusan kebijakan karena sebagai kepala eksekutif, sertadapat dilihat dari adanya perumusan kebijakan dalam komisi-komisi presidensial ataupun rapat dalam kabinet. Sementara, pemeran serta tidakresmi salah satunya adalah warga negara individu. Warga negara seringkalidiabaikan dalam hubungannya dengan legislatif ketika kebijakan publik dalam proses pembuatan. Namun, dalam negara yang memiliki sistem otoriter kepentingan dan keinginan warganegara biasanya adalah akibat dari adanya kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupanmasyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat).

Pemerintah adalah lembaga atau Badan badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, sedangkan C.F Strong mendefinisikan Pemerintah adalah segala kegiatan badan badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan Yudikatif dalam mencapai tujuan negara. Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan

Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Klasifikasikan pemerintah dapat dilihat dalam empat pengertian, yakni, Pertama, pemerintah mengacu pada proses pemerintah, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang; Kedua, istilah pemerintah juga bisa dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri, kepada kondisi adanya tata aturan; Ketiga, pemerintah seringkali berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan; Keempat, istilah pemerintah juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Pemerintah akan dijalankan oleh pemimpin daerah sesuai dengan kewenangan kota (wilayah) yang dimiliki. Dalam Kamus Tata Ruang telah disebutkan bahwa kota merupakan pemukiman yang berpenduduk relatif besar, luas area terbatas, pada umumnya bersifat non-agraris, dan kepadatan penduduk relatif tinggi. Sehingga dapat diartikan bahwa, seperti contoh penelitian yang akan Penulis kaji adalah pemerintah Kota Batam adalah lembaga Penyelenggara urusan pemerintahan bersama dewan perwakilan rakyat daerah dari pemerintah pusat dalam wilayah Kota yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Wilayah kota Batam, dalam sistem pemerintah yang dijalankan dipengaruhi oleh kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga dengan kewenangan tersebut, sistem pengelolaan yang dijalankan terkait dengan pengelolaan pemerintah pusat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965, Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1966, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974 dan Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 1977.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kota Batam, Pasal 21 menyebutkan bahwa dengan terbentuknya Kota Batam sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya mengikutsertakan Badan Otorita Batam. Berikutnya berdasarkan Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Ketentuan lain juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, sebagaimana Pasal 1: menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pengaruh globalisasi di level lokal membawa kapitalisme masuk ke dalamnya. Globalisasi menjadi gerbang masuknya bagi negara-negara berkembang dengan semangat kapitalis mereka. Salah satu dampak dari masuknya globalisasi di level lokal adalah kebijakan desentralisasi yang terjadi pada tahun 1999. Hal tersebut membuka peluang baru aktor ekonomi lama bermain politik, „melanggengkan” jaringan bisnis mereka di daerah, juga memindahkan *crony capitalism*. *Crony capitalism* atau kapitalisme kroni adalah istilah untuk menggambarkan ekonomi kapitalis dimana kesuksesan suatu bisnis bergantung pada seberapa dekat hubungan antara pengusaha dengan pihak pemerintah. Kapitalisme kroni sering diimplementasikan pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia yang memberikan kebijakan khusus kepada calon pengusaha. Seperti adanya pembebasan pajak, pemberian ijin khusus bantuan pemerintah dan lainnya. Adapun tujuannya adalah untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah dengan terus memudahkan para pengusaha untuk menanamkan modalnya sebagai imbalan atas apa yang pemerintah tetapkan, yaitu dengan memudahkan urusan investasi.

Investasi Asing di Indonesia

Investasi asing berawal dari modal yang ditanamkan oleh perusahaan asing ke sebuah perusahaan yang ada di dalam negeri. Biasanya, investasi asing dilakukan oleh negara-negara yang tergolong maju ke negara berkembang. Namun, dapat juga dilakukan dari sesama negara maju. Negara yang menerima investasi asing kemudian akan mendapat keuntungan, seperti salah satunya adalah pemugaran teknologi. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Menurut pasal 6 UU PMA, terdapat bidang-bidang penanaman modal asing, yaitu Pelabuhan-pelabuhan; Produksi, Transmisi dan Distribusi

tenaga listrik untuk umum; Telekomunikasi;Pelayaran;Penerbangan; Air minum; Kereta Api umum; Pembangkit TenagaAtom; dan Media massa. Indonesia menjadi urutan ke-4 sebagai tujuan utama investasi di dunia.

Gambar Tujuan Utama Investasi

Dunia 2015-2017



Sumber:<http://ksp.go.id/wpcontent/uploads/2017/10/BKPM-3-Tahun-Pemerintahan-Jokowi-JK-1.pdf>

Dalam berinvestasi di Indonesia, investor asing harus memenuhi aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh KepalaBKPM dalam Peraturan BKPM No.14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal. IzinPrinsip adalah izin yang harus dimiliki dalam berinvestasi, baik domestikmaupun asing. Izin Prinsip memiliki beragam jenis, seperti Izin Prinsip Baru (izin pertama kali sebelum berinvestasi), Izin Prinsip ekspansi/perluasa (izin melakukan eksoansi perusahaan), dan Izin Prinsip Penggabungan (izin sebelum melakukan merger 2 perusahaan atau lebih). Perizinan tersebut diajukan melalui PTSP di BKPM, BPMPTSP Prov./Kab./Kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK. Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi oleh inestor asing terkait pemodalan investasi, yaitu lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), total ini belum termasuk tanah dan bangunan. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, peran investasi asing sangat dibutuhkan untuk membangun perekonomian negara. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari utamanya negara-negara maju. Dengan adanya investasi asing mampu meminimalisir defisit tabungan negara.

Pengelolaan Daerah Kepulauan

Secara umum terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan daerah kepulauan (Mohammad Ikhanuddin Mawardi, 2019). *Pertama*, sebagian besar pulau-pulau merupakan daerah kawasan tertinggal dan banyak yang tidak berpenghuni. *Kedua*, keterbatasan pelayanan administrasi pemerintahan, pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya, sarana dan

prasarana komunikasi dan transportasi, termasuk transportasi laut yang menghubungkan antarpulau kecil dan pulau besarnya. *Ketiga*, terjadinya kegiatan ilegal dan penyelundupan, kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi mengancam stabilitas keamanan. Disisi lain, potensi daerah kepulauan kecil sangat tinggi baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan Indonesia, terutama pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perbatasan. Sumber daya alam seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove, perikanan, dan wisata bahari yang ada di daerah kepulauan dapat menjadi aset pembangunan bagi pengembangan daerah. Yang menjadi permasalahan selama ini adalah minimnya upaya promosi potensi pembangunan di pulau-pulau kecil. *Keempat*, terbatasnya peralatan, frekuensi dan tenaga keamanan di laut. *Kelima*, pasokan listrik yang belum memadai.

Keenam muncul akibat besarnya potensi sumber daya yang ada di laut adalah isu kewenangan pengelolaan wilayah laut yang menjadi perhatian serius dari berbagai *stakeholder*. Mereka beranggapan bahwa dengan dilaksanakannya desentralisasi maka kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan yang ada dalam ruang lingkup wilayahnya mutlak berada di tangan daerah tersebut tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan daerah sekitar dan terlebih-lebih kepentingan pemerintah pusat.

Masalah perbedaan kepentingan yang telah disebutkan diatas yang sering menyebabkan terjadinya friksi-friksi antara beberapa daerah daerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dengan adanya pengaturan batas wilayah laut sejauh 12 mil bagi wilayah laut yang merupakan kewenangan provinsi dan 4 mil bagi wilayah laut yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kotabeberapa daerah beranggapan bahwa pemanfaatan sumber daya laut yang ada di wilayahnya tidak boleh dilakukan oleh daerah lain bahkan oleh pemerintah pusat.

Akibat persoalan ini terjadi konflik kepentingan antara daerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang memunculkan kesan ada "pengkavlingan" wilayah laut dan pembatasan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya yang berada di wilayah laut. Bahkan tidak jarang kemudian timbul bentrokan dalam hal pemanfaatan sumber daya kelautan oleh beberapa *stakeholder* yang ada. Contoh kongkret adalah bentrokan dalam hal pemanfaatan sumber daya kelautan dalam hal penangkapan ikan.

Persinggungan pengelolaan sumber daya di wilayah laut tidak hanya terjadi antar daerah otonom, tetapi juga terjadi antara daerah otonom dengan pemerintah pusat terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang bersifat strategis. Beberapa fakta menunjukkan bahwa terjadi friksi antar tingkat pemerintahan dalam hal pengelolaan sumber daya laut. Misalnya dalam hal pengelolaan pelabuhan, pemerintah daerah merasa pelabuhan yang berada di daerah provinsi harus dikelola pemerintah daerah bukan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi batas pengelolaan sumber daya di wilayah laut tidak ditafsirkan batas yurisdiksi seperti dalam hal

batas perbatasan negara. Ini artinya pengelolaan jangan sampai dimaknai seperti batas wilayah kedaulatan.

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function*. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan diatas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan Kebijakan merupakan bukti dan digunakan dalam mengukur sejauh mana pelaksana kebijakan mengimplementasikan kebijakan. Sehingga para pelaksana kebijakan mengerti dan paham arti dan tujuan dari sebuah kebijakan yang dilaksakan. Berdasarkan wawancara bahwa pembangunan infrastruktur di kecamatan bulang sudah di atur dalam perwako batam. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur mempunyai landasan hukum yang jelas, yang dimana setiap kegiatannya diatur dan peraturan tersebut dari sisi anggaran dan target yang harus dicap dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Galang, Bulang dan Belakang Padang. Pada kegiatan pembangunan ini pihak kecamatan mempunyai prioritas dalam pembangunan yang dimana prioritas ini di dapatkan dari hasil musyawarah rembuk warga (musrenbang). Dari musrenbang inilah di dapatkan hasil lokasi daerah yang akan di bangun atau di prioritaskan.

Walikota Batam dalam acara musrenbang untuk Rempang, Galang dan Belakang Padang, telah menargetkan semua jalan harus semenisasi. Untuk itu, beliau menginstruksikan pejabat terkait untuk mendata semua jalan yang ada di Rempang, Galang dan Belakang Padang. Bukan tanpa alasan, pembangunan yang ditargetkan Pemko Batam semata-mata ingin menjadikan Galang, Bulang dan Belakang Padang lebih baik dan memesonakan sehingga warga Galang, Bulang dan Belakang Padang bisa menikmati, dengan banyaknya wisatawan pengunjung, maka perekonomian di Galang, Bulang dan Belakang Padang bisa menggeliat dan masyarakat bisa sejahtera, masyarakat memanfaatkan potensi tersebut, dengan menyarankan masyarakat untuk mempromosikan destinasi wisata alam, kuliner, dan sebagainya. Walikota juga masyarakat Belakang Padang kompak agar pembangunan di Belakang Padang lancar. Dengan menjaga kekompakan maka pembangunan dan ekonomi Galang, Bulang dan Belakang Padang.

Dalam mengembangkan wilayah terdapat campur tangan pemerintah. Hal itu termasuk dalam sinergisme fungsional (Functional Sinergism). Dalam sinergisme fungsional penekanan penggabungannya adalah pada kegiatannya dan institusi yang berkompeten menanganinya. Institusi atau lembaga bertugas manage kota dan wilayah itu sendiri. Intervensi pemerintah pada wilayah Galang, Bulang dan Belakang Padang khususnya, berupa Pemerintah Kota Batam beserta institusi atau badan yang terkait, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU). Kedua lembaga tersebut merupakan yang paling berpengaruh dalam menata dan merealisasikan pengembangan wilayah. BAPPEDA sebagai perancang ruang, dan Dinas PU yang merealisasikan rancangan itu, dengan mengeluarkan izin apabila ada bangunan yang akan didirikan. Hal itu tetap harus pada rancangan yang telah disusun oleh BAPPEDA. Selain dari lembaga pemerintah, ada juga pihak swasta yang dilibatkan. Biasanya pemerintah mengeluarkan tender apabila ada proyek yang ingin dibangun, adanya kerjasama atau penggabungan institusi (baik pihak pemerintah maupun swasta) untuk Pembangunan Galang, Bulang dan Belakang Padang.

Pembangunan Berkelanjutan

Tidak ada satu pun negara yang dapat bertahan sendirian. Jaringan dan kerja sama yang baik mutlak diperlukan untuk menjamin lancarnya proses pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, sangat krusial adanya jaminan terhadap sistem yang berfungsi dengan baik antara aktor-aktor ekonomi lokal seperti para pelaku wirausaha, institusi lingkungan bisnis, pemangku kepentingan di bidang riset dan pengembangan, serta otoritas lokal. Hal yang acap kali dilupakan adalah segi pertahanan keamanan yang

mendukung dan memperlancar sistem ekonomi sehingga jaringan lalu lintas kerja sama dapat terjalin dengan baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global. Kegiatan kerja sama ekonomi dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana yang dicanangkan oleh PBB ataupun Renstra Jangka Panjang nasional, kini bukan lagi hanya sebatas wacana pengurangan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan pendidikan dasar dan kesehatan, pembangunan dan penguatan kemitraan seluruh dunia, namun juga mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan standar hidup melalui akselerasi pertumbuhan pendapatan dan pekerjaan.

Pertumbuhan semacam ini perlu didukung aspek pertahanan keamanan yang memadai baik di tingkat nasional dan internasional. Tren semacam ini semakin meningkat, karena kerja sama internasional yang adapun semakin terpicu dengan timbulnya kesadaran untuk bertindak bersama ke arah pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen terkini yang dilakukan pelbagai negara dalam menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan sebagian besar adalah dengan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan yang juga ditujukan memberikan keuntungan bagi generasi mendatang. Dengan kebijakan semacam itu, peran inovasi sangat diperlukan sehingga sektor riset dan pengembangan, lingkungan yang inovatif, serta kemampuan ekonomi untuk menerapkan berbagai hasil riset menjadi tolok ukur tingkat. Walaupun dari segi ekonomi, penilaian ekonomi menjadi tolok ukur utama, namun pengembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi serta inovasi, perlu dilakukan terus-menerus karena itu semua adalah elemen utama untuk memastikan terjadinya pembangunan serta keuntungan ekonomi yang diperoleh dari sistem yang berdaya saing. Kebutuhan akan keberlanjutan itulah yang kemudian memicu sistem ekonomi mengadaptasi berbagai teknologi dan pengetahuan baru yang kemudian berkontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi, berpengaruh pada kualitas hidup, membangun masyarakat informasi, memberikan jalan terhadap peningkatan, dan pencapaian baru ekonomi berbasis lingkungan. Bagaimana dengan sektor pertahanan? Tren valuasi sektor pertahanan suatu negara tidak lagi hanya seputar berapa banyak personel tentara yang dimiliki namun lebih ke arah sistem yang lebih kompleks yang diwarnai dengan persenjataan serta peralatan dan perlengkapan pertahanan canggih didukung teknologi yang mumpuni. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi seperti saat ini, kondisi kebutuhan tersebut menjadi tantangan berlipat ganda.

Implementasi pembangunan

infrastruktur Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan karena mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Dalam suatu kebijakan, tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program. Ketersediaan sumberdaya merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu kebijakan di pengaruhi oleh sumber daya, keberadaan sumber daya merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi, karena tanpa adanya sumber-sumber kebijakan yang sudah di buat tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam proses implementasi suatu kebijakan. Sumber daya manusia disini adalah Pegawai yang terlibat dalam kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Bulang. Berdasarkan wawancara dapat dilihat bahwa sumber daya manusia untuk dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di Galang, Bulang dan Belakang Padang masih belum memiliki sumber daya dalam bidang teknis sendiri, sehingga di dalam kegiatan ini melibatkan konsultan dari pihak luar, yaitu konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan dalam membantu untuk berjalan nya kegiatan ini sendiri. Sumber daya finansial atau anggaran akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur sehingga menjadi hal yang penting dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, jika anggaran kurang maka kegiatan pembangunan infrastruktur tidak berjalan efektif dan tidak maksimal. Sesuai Renstra bahwa untuk mencapai sasaran tersebut, program dan kegiatan direncanakan didanai melalui sumber pendanaan, yaitu APBD Murni dan APBD Perubahan Kota Batam Tahun 2018-2018, untuk Kecamatan Bulang yaitu sebesar adalah sebesar Rp 4,455,836,900.00 tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebesar Rp 5,558,601,000.00. Sarana dan Prasarana adalah sumber daya yang sangat penting dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bulang. Menurut Van Meter dan Van Horn, Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau insentif lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Sarana dan prasarana disini sangat penting dalam menunjang keberhasilan Implementasi Pembangunan Infrastruktur di Galang, Bulang dan Belakang Padang.

Komunikasi

Konsep komunikasi pada implementasi kebijakan pada umumnya menganalisa apakah pesan yang dikirimkan komunikator kebijakan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh komunikan kebijakan. Jika pesan yang dikirimkan dapat diterima secara lengkap, maka komunikasi disebut efektif. Adapun indikator diukur dari Sosialisasi mengenai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, Peneliti menemukan hubungan komunikasi dalam implementasi program ini dimulai ketika pihak pelaksana program melakukan sosialisasi kepada masyarakat, lalu dalam pembangunan pekerjaan infrastruktur melibatkan masyarakat, masyarakat di bentuk Kelompok Kerja Masyarakat atau disingkat (POKJAMAS), Pokjamas sendiri di bentuk oleh masyarakat sendiri dari hasil musyawarah dan mufakat. Dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur masyarakat sendiri lah yang membangun kegiatan yang ada di wilayah atau tempat mereka. Kelompok yang memiliki tujuan demi membangun daerahnya itulah bergabung dan memiliki kesamaan tujuan. Oleh karena itu menurut peneliti, komunikasi antara pihak kecamatan dan masyarakat sangat penting sekali, karena melalui komunikasi dapat terciptanya hasil yang baik dan menguntungkan masyarakat di Galang, Bulang dan Belakang Padang.

Karakteristik badan-badan pelaksana

Dalam pengimplemtasi pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada 2 faktor yaitu faktor organisasi internal dan faktor eksternal. Organisasi formal yaitu faktor dari yang mempengaruhi kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Galang, Bulang dan Belakang Padang. Organisasi formal dari kegiatan Kebijakan Pembangunan ini yaitu Tim Kecamatan dan Kelurahan pada dasarnya sama, kekurangan Sumber Daya Manusia dan keterbatasan daerah hinterland sendiri, yang dimana sarana/prasarana.

Berikut untuk menjawab permasalahan, adapun indikator di ukur dari Faktor internal dan Faktor Eksternal berikut perhatikan jawaban wawancara. Kebutuhan SDM serta sarana/prasarana menjadi faktor internal yang paling utama dalam Implementasi Pembangunan Infrastruktur dan juga salah satu menjadi hambatannya ialah keterbatasan daerah hinterland harus membeli bahan baku dari daerah mainland terlebih dahulu.

Kecenderungan/Sikap

Kecenderungan disini tertuju pada sikap pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan program, bila mereka mempunyai pandangan sikap yang positif maka kebijakan tersebut akan dapat dilakukan dengan baik, namun apabila sebaliknya maka tidak akan berjalan dengan efektif. Dalam menyampaikan komunikasi sendiri kecamatan bulang

menggunakan pendekatan untuk mewujudkan pendekatan dengan masyarakat. Suatu program yang dibuat oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu masyarakat berkepentingan dan perlu memperhatikan program yang diputuskan oleh pemerintahnya. Kondisi Sosial, Ekonomi dan politik Aspek sosial masyarakat di kecamatan bulang pada umumnya merupakan masyarakat yang masih memegang teguh budaya dan menggunakan bahasa melayu. Keadaan sosial di Galang, Bulang dan Belakang Padang sangat baik sehingga masyarakat menerima pembangunan infrastruktur yang di buat oleh Pemerintah Daerah. Aspek ekonomi masyarakat Kecamatan Bulang, pada umumnya masyarakat kecamatan bulang mempunyai penghasilan sebagai nelayan dan berkerja sebagai karyawan, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur masyarakat tidak ada penolakan sehingga kegiatan berjalan dengan baik sehingga membuat jalur perekonomian berjalan. Dapat dilihat bahwa pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Nasrun, yaitu dari pihak pemerintah dan pihak legislatif atau pun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, dalam penganggaran tidak adanya hambatan dan permasalahan, dan setiap kegiatan di dukung penuh, dikarenakan kegiatan pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh dalam mewujudkan keadilan dan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan pembangunan infrastruktur tersebut.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa implementasi pembangunan daerah hinterland di Rempang, Galang dan Belakang Padang sudah berjalan namun belum sepenuhnya efektif karena masih banyak daerah yang belum dibangun di karenakan kebijakan pemerintah tentang pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat baru berjalan 3 tahun.

Kebijakan Pemerintah Kota Batam

Pengelolaan Daerah Kepulauan

- (1) Sebagian besar pulau-pulau merupakan daerah kawasan tertinggal dan banyak yang tidak berpenghuni.
- (2) Keterbatasan pelayanan administrasi pemerintahan, pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya, sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi, termasuk transportasi laut yang menghubungkan antarpulau kecil dan pulau besarnya.
- (3) Terjadinya kegiatan ilegal dan penyelundupan, kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi mengancam stabilitas keamanan.

- (4) Terbatasannya peralatan, frekuensi dan tenaga keamanan di laut.
- (5) Pasokan listrik yang belum memadai.
- (6) Muncul akibat besarnya potensi sumberdaya yang ada di laut adalah isu kewenangan pengelolaan wilayah laut yang menjadi perhatian serius dari berbagai *stakeholder*.

Petimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Petimbangan keuangan antarapemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Dalam mengembangkan wilayah terdapat campur tangan pemerintah. Hal itu termasuk dalam sinergisme fungsional (Functional Sinergism). Dalam sinergisme fungsional penekanan penggabungannya adalah pada kegiatannya dan institusi yang berkompeten menanganinya. Institusi atau lembaga bertugas memanager kota dan wilayah itu sendiri. Intervensi pemerintah pada wilayah Galang, Bulang dan Belakang Padang khususnya, berupa Pemerintah Kota Batam beserta institusi atau badan yang terkait, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU). Kedua lembaga tersebut merupakan yang paling berpengaruh dalam menata dan merealisasikan pengembangan wilayah. BAPPEDA sebagai perancang ruang, dan Dinas PU yang merealisasikan rancangan itu, dengan mengeluarkan izin apabila ada bangunan yang akan didirikan. Hal itu tetap harus pada rancangan yang telah disusun oleh BAPPEDA. Selain dari lembaga pemerintah, ada juga pihak swasta yang dilibatkan. Biasanya pemerintah mengeluarkan tender apabila ada proyek yang ingin dibangun, adanya kerjasama atau penggabungan institusi (baik pihak pemerintah maupun swasta) untuk Pembangunan Galang, Bulang dan Belakang Padang.

Implementasi pembangunan infrastruktur

a. Standard dan Sasaran Kebijakan Dalam mengukur standard

kebijakan pemerintah memiliki landasan atau aturan yang harus dilaksanakan, di dalam kegiatan pembangunan infrastruktur kecamatan bulang berpedoman pada Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan Kota Batam.

b. Sumber daya

Sumberdaya di Rempang, Galang dan Belakang Padang masih kurang terutama sumberdaya manusia dalam bidang teknik dan sesuai bidang pembangunan infrastruktur, yang dimana di kecamatan bulang pada kegiatan pembangunan kegiatan masihdi laksanakan oleh Staff yang tidaksesuai bidang dari kekurangan sumber daya manusia di bidang teknik kecamatan bulang menggunakan konsultan sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan. Dari segi anggaran yang ada, anggaran sudah di atur dalam peraturan walikota batam, dan anggaran pembangunan infrastruktur di daerah hinterland maupun mainland sama sehingga realisasi atau target pembangunan tidak sama di karenakan anggaran yang sama. Seharusnya pemerintah membeda antara daerah mainland dan hinterland, di karenakan biaya akomodasi lebih besar di banding daerah mainland.

c. Komunikasi

Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat itu sangat penting, karena dengan adanya komunikasi kegiatan pembangunan infrastruktur akan berjalan lancar dalam pelaksanaannya, karena melalui komunikasi lah suatu kebijakan akan dengan mudah dilaksanakan dan agar terciptanya hasil yang baik.

d. Karakteristik badan-badan pelaksana/Pelaksana Program

Karakteristik badan-badan pelaksana/ Pelaksana Program itu sangat penting dan menjadi salah satu indikator dalam implementasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bulang, karena dukungan dalam pembangunan infrastruktur badan pelaksana dapat dukungan dari masyarakat sehingga dalam pengerjaan tidak ada kendala.

e. Kecenderungan/Sikap

Sikap pelaksana pembangunan infrastruktur di kecamatan bulang sudah baik di karenakan sikap mereka di pandang masyarakat sudah sangat baik. Setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat pareto superior (membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat), bukan pareto optimal (membangun mengorbankan orang lain). Hubungan dan komunikasi antar pemerintah kecamatan bulang dan masyarakat sudah sangat baik sehingga implementasi pembangunan infrastruktur berjalan dengan lancar.

f. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi politik sangatlah penting dalam implementasi kebijakan dimana dapat kita lihat dimana lembaga legislatif sangat berpengaruh dalam penganggaran

dana kegiatan dan perencanaan kegiatan. Sehingga kegiatan tersebut di sahkan dan dapat dirasakan dan dapat di realisasikan oleh pengguna anggaran dapat mewujudkan keadilan dan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan pembangunan infrastruktur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abe, Alexander. 1994. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pusat Jogja Mandiri.
- AG Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Aryad, L., 1997. *Ekonomi Pembangunan. Edisi ketiga*. Yogyakarta ; STIE YKPN.
- Barry Buzan. Ole Weaver. 2003. *Regions and Powers the Structure of International Security*. Oxford: Cambridge University Press.
- Buzan, Barry, Ole Waever, and Jaap deWilde. 1998. *Security: A New Framework For Analysis*, Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Caballro, Anthony, Mely, and Ralf Emmers. 2006. *Understanding the Dynamics of Securiizing Non-Traditional Security*. Eds. Mely Callabero- Anthony, Ralf Emmers, And Amitav Acharya, Hampshire: Ashgate.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Edisi Bahs)*. Pustaka Pelajar.
- Departemen Perindustrian. 2009. *Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas Industri Alat Angkut Tahun 2010 – 2014*.
- Hanita, Margaretha, 2020, *Ketahanan Nasional, Teori, Adaptasi dan Strategi*. Jakarta, UI Publishing.
- Handayani Risma, 2014, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, Makassar: Alauddin University Press.
- Ibnu, Mukhadis, dan Dasna. 2003. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Malang: UM.
- Inikori, Joseph E. (2002). *Africans and the Industrial Revolution in England: A Study in International Trade and Economic Development*. Cambridge University Press. hlm.102.
- ISBN 978-0-521-01079-5.
- Kuhn, Thomas. 2005. *The structure of scientific revolutions. (terjemahan)*. Jakarta: remaja

- Rosdakarya Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Lexy J. Moleong, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya. Edisi revisi; cetakan ketiga puluh delapan, Juli 2018.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Matthew B. Miles A. Huberman Michael. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications, Inc. 2455 Teller Road Thousand Oaks, California 91320.
- Wan Usman, 2003. *Daya Tahan Bangsa Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- William N. Dunn, 2003. *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*, University of Pittsburgh, edition translate and published by arrangement with prentice-hal, Inc. by Gadjah Mada University Press.
- Jurnal
- Adi Putra, Purbaja; Krisnadi, Luck. Muttahar, Moch. Zaelana. Abdullah, Hafid. Amalia, Dewi. (2020). *Pengembangan Boogie Wheel Tank AMX-13 Untuk Komponen Kendaraan Tempur Tank Jenis Ringan*.
Jurnal Teknologi Bahan dan Barang Teknik Vol 10, No 2, Desember.
- Ahmad D.P, Tubagus; Martinus Pasaribu, Yannes dan Bagus Sriwarno, Andar (2016); Jurnal Sositologi. Vol 15 No 1, April. Strategi.
- Bhirawa Dwi Saputra F, Frizty Ardianti dan Okky Surya Permana A, *Tinjauan Tentang Keberadaan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) di Industri Otomotif Indonesia*, Privat Law Edisi 03, Nov 2013 - Maret 2014.
- Corrin Glesne, *Becoming Qualitative Researchers: An Introduction*, (Boston: Pearson Education, Inc., 2006), hlm. 37-38.
- George W. Fairweather dan Louis G. Tornatzky, *Experimental methods for Social Policy Research* (New York: Pergamon Press, 1977).
- Grabowski, Richard. 1994. *The Failure of Import Substitution: Reality and Myth*. *Journal of Contemporary Asia* Abingdon: Routledge, ISSN 0047- 2336, ZBD-ID 185178-0 - Vol.24.1994,3,p. 297-309.
- Incekara, A., and Ustaoglu, M. (2012). *European union's multilateralism on trade policies, custom unions and free trade agreements; comparative SWOT analysis of Turkey and South Korea's automotive industries*, Procedia- social and behavioral science

58:464-473.

- Kuhn, Thomas S. (1976). *Theory-change as structure-change: Comments on the need for formalism*. *Erkenntnis*, 10(2), <https://doi.org/10.1007/BF00204969>.
- Lucas, Robert E., Jr. 2002. *Lectures on Economic Growth*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rinardi, Haryono., 2021. *Industrialisasi di Indonesia: Perkembangan Industri Substitusi Impor Indonesia Selama Masa Orde Baru*. Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
- S. Dewayana, Tri wulandari. Sugiarto, Dedy. Hetharia, Dorina. (2012). *Peluang dan Tantangan Industri Komponen Otomotif Indonesia*.
- Schwandt, T. A. (2007). *The SAGE Dictionary of Qualitative Inquiry (3rd Edition)*. Thousand Oaks, CA: SAGE, Publications, Inc. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.4135/9781412986281>.
- Sigit Sardjono, *Rekonstruksi Industrialisasi Guna Mewujudkan Kemandirian Indonesia*, Staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Program Pascasarjana Univ 17 Agustus 1995 Surabaya: DIE - Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, Vol 5 nomer 3. April 2009).
- Triwulandari S. Dewayana, Dedy Sugiarto, Dorina Hetharia, *Peluang dan Tantangan Industri Komponen Otomotif Indonesia*, Program Magister Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, Oktober 2012. www.journal.unipdu.ac.id.
- Media Daring (Online)
- Konsentrasi dalam pembangunan daerah hinterland di provinsi Kepulauan Riau <http://www.batampos.co.id/batam-post-cetak/2015/1/15/o2.htm> , diunduh 23 Desember 2022.
- Universitas Sumatra Utara Jurnal Daerah Hinterland <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/> diunduh tanggal 23 Desember 2022.
- Pemerintahan Kota Batam Kecamatan Galang, 2016. Renstra <https://arsipskpd.batam.go.id/> diakses tanggal 23 Desember 2022